

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penetapan Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 oleh Pemerintah, mengenai Pemerintah daerah dan Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik secara nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah (Halim, 2001). UU ini diganti dan disempurnakan menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah pusat ke pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat melalui DPRD. Hal ini mendorong untuk memberdayakan masyarakat dalam menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Suwardjono (2005) menegaskan bahwa akuntansi akan mempunyai peran yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil kebijakan ekonomik untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomik Negara. Salah satu tujuan ekonomik Negara adalah alokasi sumber daya ekonomik secara efisien sehingga sumber daya ekonomik yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Hal senada dikemukakan Hay (1997) bahwa secara umum tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pemerintah adalah untuk : (1) menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomik, politik, dan sosial, serta menampilkan akuntabilitas. (2) menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja manajer dan organisasi.

Salah satu alat yang digunakan untuk mengontrol kebijakan pemerintah adalah teknik akuntansi. Sebagai alat kontrol dan alat untuk mencapai tujuan pemerintah. Dari kacamata akuntansi, khususnya sistem akuntansi keuangan, akuntansi harus dapat berperan dalam mengendalikan roda pemerintahan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku Suwardjono (2005). Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh pengelola dan penyaji informasi keuangan.

Konsep komitmen organisasi merupakan variabel yang memegang peranan penting dalam hubungan antara pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dengan senjangan anggaran. Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal*) yang ingin dicapai organisasi (Mowday et al, 1979 dalam darma, 2004). Berdasarkan hasil penelitian, komitmen organisasi yang tinggi akan cenderung menurunkan senjangan anggaran dan signifikan terhadap kinerja (Keller, 1997 dalam Darma, 2004). Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan (Nouri dan Parker, 1996; McClurg, 1999; Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002; Darma, 2004). Pada konteks pemerintah daerah, aparat yang merasa sasaran anggarannya jelas, akan lebih bertanggung jawab jika didukung dengan komitmen aparat yang tinggi terhadap organisasi (Instansi) pemerintah daerah. Aparat akan lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Hal ini akan mendorong aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi sehingga akan mengurangi senjangan anggaran.

Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga menuntut adanya pengendalian untuk mengetahui sejauhmana kewenangan dan

tanggung jawab yang diberikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Fungsi pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pengendalian akuntansi (Ietje, 2003). Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif (Mardiasmo, 2002).

Dari aspek Das Sein (fenomena) Das Sollen (konsep atau teori yang ada) yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja dan kinerja keuangan instansi pemerintah daerah di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah faktor pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian akuntansi dan komitmen organisasi.

Penelitian-penelitian mengenai akuntabilitas kinerja yang dipengaruhi oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah oleh Hilmi (2004) yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dengan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Ietje (2003) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Sistem pelaporan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pernah diujikan oleh Hilmi (2004).

Hal ini yang mendukung penelitian ini adalah, hasil dari penelitian-penelitian yang membahas permasalahan mengenai pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, akuntabilitas kinerja dan kinerja keuangan instansi pemerintah ini banyak diuji pada lokasi daerah yang sama yaitu pada kota / kabupaten propinsi DIY, dan sangat mungkin terjadi perbedaan antara pemerintah daerah lainnya. Hal ini yang mendukung peneliti untuk mencoba melakukan pengujian pada lokasi pemerintah daerah yang berbeda yaitu di kota Yogyakarta (Hilmi 2004).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam hal ini peneliti akan mereplikasi penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi**

Keuangan Daerah, Pengendalian Akuntansi, Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi akuntabilitas kinerja dan kinerja keuangan instansi pemerintah?
2. Apakah pengendalian akuntansi mempengaruhi akuntabilitas kinerja dan kinerja keuangan instansi pemerintah?
3. Apakah komitmen organisasi mempengaruhi akuntabilitas kinerja dan kinerja keuangan instansi pemerintah?
4. Apakah akuntabilitas kinerja mempengaruhi kinerja keuangan instansi pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi akuntabilitas kinerja dan kinerja keuangan instansi pemerintah.
2. Untuk mengetahui apakah Pengendalian akuntansi mempengaruhi akuntabilitas kinerja dan kinerja keuangan instansi pemerintah.
3. Untuk mengetahui apakah Komitmen organisasi mempengaruhi akuntabilitas kinerja dan kinerja keuangan instansi pemerintah.
4. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas kinerja mempengaruhi kinerja keuangan instansi pemerintah.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1) Kontribusi penelitian secara teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan hubungan antar variabel secara empiris di lapangan dari konsep-konsep yang ada sehingga mampu mendukung pengembangan teori mengenai pemahaman sistem akuntansi, pengendalian akuntansi, komitmen organisasi, akuntabilitas kinerja, dan kinerja keuangan instansi pemerintah.

2) Kontribusi penelitian secara praktis :

Bagi pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pada umumnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota dan Propinsi Yogyakarta pada khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kinerja keuangan instansi pemerintah.